

# IMPLEMENTASI PROGRAM LANSIA DI DESA TANJUNGMULYA KECAMATAN PANUMBANGAN KABUPATEN CIAMIS

Oktavia Nur Fadilah<sup>1</sup>, Eet Saeful Hidayat<sup>2</sup>, R Didi Djajuli<sup>3</sup>

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

E-mail : oktavia\_nur\_@student.unigal.ac.id

## ABSTRAK

*Peningkatan populasi lansia yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas hidupnya menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Oleh karena itu, program lansia hadir untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program lansia di Desa Tanjungmulya. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif yang dikaji secara kualitatif. Data primer diperoleh dari informan kunci seperti perangkat desa, kader posyandu, dan lansia penerima manfaat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan kegiatan, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program lansia di Desa Tanjungmulya telah berjalan cukup efektif dari sisi pelaksana dan dukungan masyarakat, efektivitas jangka panjang masih terhambat oleh lemahnya koordinasi lintas sektor dan minimnya dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, keberlanjutan program membutuhkan penguatan kolaborasi antar instansi dan peningkatan partisipasi lansia secara aktif.*

**Kata Kunci :** *Desa Tanjungmulya, Implementasi, Program Lansia.*

## PENDAHULUAN

Perubahan struktur demografi global menunjukkan tren menuju penuaan populasi, yang tercermin dari peningkatan proporsi penduduk lanjut usia (lansia) secara signifikan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga menjadi isu krusial di negara berkembang, termasuk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (2023) mencatat bahwa proporsi penduduk lansia telah mencapai 11,75%

dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup.

Pertumbuhan populasi lansia memunculkan tantangan multidimensional, terutama terkait kebutuhan akan layanan sosial, kesehatan, dan ekonomi yang spesifik bagi kelompok usia ini. Menanggapi hal tersebut, pemerintah dari tingkat pusat hingga desa mulai merancang dan

mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan dan perlindungan lansia. Program-program ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas sosial dan ekonomi, serta dukungan psikologis guna menjamin kualitas hidup lansia yang layak dan bermartabat.

Secara konseptual, program lansia bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah usia (*age-friendly environment*) guna menunjang keberfungsian sosial para lansia dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ini dioperasionalisasikan melalui berbagai kegiatan, antara lain posyandu lansia, pelatihan keterampilan, bantuan sosial reguler, hingga penyelenggaraan sekolah lansia. Implementasi program tersebut, khususnya pada tingkat desa, sangat dipengaruhi oleh kapasitas lokal, termasuk inisiatif yang dikembangkan serta peran aktif kader masyarakat dan perangkat desa. Keterlibatan aktor-aktor lokal ini menjadi krusial mengingat mereka memiliki pemahaman kontekstual yang mendalam terhadap kondisi demografis, sosial, dan kebutuhan spesifik para lansia di wilayahnya masing-masing.

Namun, pelaksanaan program di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama karena evaluasi yang dilakukan cenderung bersifat prosedural dan administratif. Evaluasi semacam ini kurang mempertimbangkan dimensi sosial-ekonomi secara menyeluruh, sehingga tidak sepenuhnya

merefleksikan efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan lansia.

Dalam konteks lokal, Desa Tanjungmulya di Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, merupakan salah satu wilayah yang mengalami peningkatan jumlah lansia secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan layanan sosial yang lebih intensif, sekaligus menuntut perhatian khusus terhadap keberlanjutan kesejahteraan dan integrasi sosial lansia dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah Desa Tanjungmulya telah menginisiasi berbagai program responsif, seperti posyandu lansia, bantuan sosial rutin, sekolah lansia, serta pelatihan keterampilan. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi tingkat partisipasi masyarakat maupun efektivitas program itu sendiri. Beberapa hambatan yang sering dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, minimnya dukungan anggaran, serta kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga aspek tersebut berkontribusi terhadap rendahnya daya jangkau dan keberlanjutan program, khususnya dalam konteks penyelenggaraan di tingkat desa.

Keterbatasan pelibatan lansia sebagai subjek aktif juga menyebabkan program yang dijalankan sering kali tidak selaras dengan kebutuhan aktual

mereka. Untuk mengatasi kondisi ini dan mengurangi potensi eksklusi atau marjinalisasi, program perlu difokuskan pada penghapusan hambatan struktural maupun kultural yang membatasi ruang gerak lansia, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial masyarakat (De Tavernier & Aartsen, 2019:1).

Namun, upaya perbaikan tersebut sering kali tidak ditopang oleh sistem evaluasi program yang memadai. Lebih jauh, pendekatan evaluatif yang digunakan masih berfokus pada *output* administratif seperti pelaporan, jumlah peserta, dan kegiatan yang terlaksana, tanpa mengukur secara mendalam dampaknya terhadap aspek sosial, psikologis, dan ekonomi lansia. Padahal, evaluasi yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan program dan meningkatkan keberdayaan lansia secara nyata. Selain itu, koordinasi antar pelaksana juga masih tergolong lemah, sehingga menghambat integrasi lintas sektor dalam penyelenggaraan program.

Dalam hal ini, diperlukan suatu kerangka analitis yang mampu menangkap kompleksitas implementasi kebijakan lansia di tingkat desa. Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dianggap relevan karena menawarkan pendekatan evaluatif multidimensi. Model ini mencakup enam variabel utama yang saling memengaruhi dalam proses implementasi.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji secara kritis pelaksanaan program lansia di Desa Tanjungmulya serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan keberhasilannya. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model implementasi program lansia yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan di tingkat desa.

Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement*, yang dalam kamus diartikan sebagai menyediakan sarana untuk pelaksanaan suatu hal serta menghasilkan suatu efek atau dampak. Dengan demikian, implementasi merujuk pada tindakan nyata untuk merealisasikan kebijakan, peraturan, atau keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah guna menciptakan pengaruh tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Abdal, 2015:115).

Menurut Grindle (dalam Abdal, 2015: 116), implementasi kebijakan merupakan komponen krusial dari keseluruhan proses kebijakan dan lebih dari sekedar mengubah keputusan politik menjadi proses birokrasi yang baku. Tidak peduli seberapa efektifnya suatu kebijakan, tidak akan ada gunanya jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sudut pandang ini sejalan dengan pendapat Udoji (dalam Abdal, 2015: 116) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan bahkan mungkin lebih penting daripada

pembuatannya karena tanpa implementasi, kebijakan hanya akan menjadi rencana yang tidak terpenuhi.

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Marwiyah, 2022: 39-40) dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program-program publik. Mereka menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan;
2. Sumber daya;
3. Hubungan antar organisasi;
4. Karakteristik pelaksana;
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi;
6. Disposisi implementor.

Menurut Prapto (dalam Hartawan, dkk., 2023: 1351), keenam faktor tersebut berkontribusi pada pembentukan hubungan antara kebijakan yang disetujui dan pencapaian hasil kinerjanya. Oleh karena itu, sejauh mana faktor-faktor tersebut terpenuhi dan berfungsi secara serempak selama proses implementasi di lapangan, akan berdampak signifikan terhadap kualitas implementasi kebijakan.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan sosial dapat dilihat melalui berbagai program yang ditujukan bagi kelompok lansia. Program-program tersebut umumnya dirancang untuk memenuhi hak-hak dasar lansia, yang mencakup pelayanan keagamaan dan mental-spiritual, bantuan kesejahteraan dan jaminan sosial, peningkatan akses

terhadap pelayanan kesehatan, penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung keberadaan lansia, upaya peningkatan kualitas hidup, penyediaan sarana dan fasilitas khusus, serta pelibatan lansia dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat (Karohmah dan Ilyas, 2017: 144).

Berbagai bentuk intervensi ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin kesejahteraan lansia secara fisik dan material, tetapi juga untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan program-program tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, khususnya dalam konteks implementasi di tingkat lokal seperti desa, di mana lansia hidup dalam relasi sosial yang sangat spesifik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi program lansia di Desa Tanjungmulya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara kontekstual dan menangkap dinamika pelaksanaan program dari perspektif aktor-aktor yang terlibat.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive*

*sampling* meliputi perangkat desa, kader posyandu lansia, serta lansia sebagai penerima manfaat program.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan arsip yang relevan, seperti profil desa dan laporan kegiatan posyandu program-program lansia. Literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu juga digunakan untuk memperkaya analisis teoritis dan mendukung interpretasi temuan lapangan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik. Wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh data yang spesifik dan sistematis mengenai implementasi program lansia, dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya berdasarkan indikator dari model Van Meter dan Van Horn. Selain itu, teknik observasi partisipatif dilakukan dengan menghadiri langsung kegiatan-kegiatan program lansia. Teknik ketiga adalah studi dokumentasi, yang digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data hasil wawancara dan observasi. Ketiga teknik ini digunakan secara triangulatif untuk meningkatkan validitas data dan menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2018: 247-253).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah melalui proses pengumpulan dan analisis data, diperoleh sejumlah temuan terkait pelaksanaan program lansia di tingkat desa. Temuan-temuan tersebut diuraikan dan dikaji dalam bagian ini, dengan mengacu pada dimensi-dimensi implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka teoritis.

### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan memandang arah dan tujuan program lansia di Desa Tanjungmulya telah sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Para pelaksana dan penerima manfaat menganggap bahwa kebijakan yang dijalankan cukup relevan dan mampu menjangkau lansia yang membutuhkan, terutama dalam aspek pelayanan dasar dan kegiatan pemberdayaan. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan program dengan kondisi riil di masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Pramono (2020), bahwa keberhasilan implementasi dapat tercermin dari ketercapaian sasaran secara menyeluruh.

Namun demikian, di lapangan masih ditemukan bahwa proses komunikasi antara pelaksana program dan lansia bersifat *top-down*. Lansia jarang dilibatkan dalam proses perencanaan atau evaluasi program, sehingga suara mereka belum sepenuhnya terakomodasi. Tidak adanya mekanisme umpan balik

menyebabkan program berjalan secara administratif, tetapi kurang adaptif terhadap perubahan kebutuhan yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan partisipatif dan komunikasi dua arah agar kebijakan lebih responsif dan inklusif terhadap dinamika sosial lansia di desa.

## 2. Sumber Daya

Pelaksanaan program lansia di Desa Tanjungmulya didukung oleh sumber daya yang dinilai relatif memadai oleh para informan. Namun, meskipun ketersediaan tenaga pelaksana dan sarana prasarana seperti ruang posyandu, alat pemeriksaan kesehatan, serta perlengkapan kegiatan dianggap cukup menunjang pelaksanaan program, namun pada kenyataannya tenaga pelaksana umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus di bidang terkait. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia pun masih terbatas dan bersifat seadanya, sehingga belum sepenuhnya mampu mendukung keberlangsungan program secara optimal.

Selain itu, sebagian besar informan menyebutkan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah desa memang tersediq, namun jumlahnya masih tergolong terbatas untuk mencukupi seluruh kebutuhan program. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pelaksanaan kegiatan seperti posyandu lansia, sekolah lansia, dan pelatihan keterampilan kerap diperkuat melalui iuran kas yang dikumpulkan

secara swadaya oleh para lansia. Fenomena ini mencerminkan pentingnya aspek sumber daya dalam proses implementasi, sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Abdal, 2015), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga pelaksana, anggaran, maupun sarana pendukung.

Seiring dengan pelaksanaan program yang telah berjalan, tetap diperlukan peningkatan dalam berbagai aspek, terutama terkait efisiensi penggunaan dana dan pemerataan akses terhadap fasilitas. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa fasilitas belum sepenuhnya ramah lansia, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Di samping itu, pelatihan bagi kader masih berlangsung secara tidak terstruktur dan belum dirancang sebagai program penguatan kapasitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan sumber daya menjadi hal yang krusial agar program dapat berjalan secara lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

## 3. Hubungan Antar Organisasi

Koordinasi antarorganisasi dalam pelaksanaan program lansia di Desa Tanjungmulya masih menghadapi sejumlah kendala. Meskipun pembagian peran antara perangkat desa, kader posyandu, dan pelaksana program telah dilakukan secara formal, hubungan kerja lintas sektor, terutama dengan

pihak eksternal seperti Puskesmas dan lembaga lainnya belum berjalan secara optimal. Beberapa informan menyebutkan bahwa kerja sama yang terjalin belum ditopang oleh mekanisme koordinasi yang rutin atau sistem komunikasi yang terstruktur.

Minimnya forum koordinasi dan ketergantungan pada inisiatif individu pelaksana menyebabkan informasi tidak selalu terdistribusi dengan baik. Akibatnya, potensi dukungan dari sektor lain belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Islamy (dalam Abdal, 2015), kejelasan struktur dan pembagian tanggung jawab antar organisasi merupakan kunci penting dalam efektivitas implementasi kebijakan.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor, baik dalam bentuk pertemuan koordinasi berkala maupun pengembangan sistem komunikasi antar instansi. Dengan membangun jejaring kerja yang lebih solid, implementasi program lansia dapat menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan lansia secara lebih komprehensif.

#### 4. Karakteristik Pelaksana

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program lansia di Desa Tanjungmulya sangat dipengaruhi oleh komitmen pribadi para pelaksana. Para kader dan perangkat desa umumnya menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab moral

yang tinggi terhadap kesejahteraan lansia, yang tercermin dari kesungguhan mereka dalam menjalankan kegiatan secara konsisten. Motivasi pelaksana dalam menjalankan program sebagian besar didorong oleh rasa empati dan ikatan sosial yang kuat terhadap para lansia di lingkungan mereka. Dorongan moral dan emosional ini menjadi landasan bagi keterlibatan mereka dalam program, yang kemudian tercermin dalam bentuk komitmen pribadi untuk mendukung keberlangsungan kegiatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Afandi dan Wardjio (dalam Marwiyah, 2022) yang menyatakan bahwa komitmen individu merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan program sosial.

Namun, bergantung sepenuhnya pada motivasi individu juga membawa risiko tersendiri. Dalam beberapa kasus, pelaksana dapat mengalami kelelahan atau kejemuhan (*burnout*) akibat beban kerja yang tidak diimbangi dengan dukungan yang memadai dari institusi terkait. Meski sistem insentif telah diterapkan di desa ini, beberapa informan merasa bahwa dukungan yang diberikan masih belum proporsional dengan tanggung jawab yang mereka emban.

Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan agar pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada inisiatif personal. Pelatihan yang berkelanjutan, sistem insentif yang layak, serta pendampingan dari pihak eksternal diperlukan untuk

menjaga semangat kerja para pelaksana sekaligus menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang.

#### 5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program lansia di Desa Tanjungmulya mendapat sambutan yang cukup positif dari masyarakat. Antusiasme warga, khususnya keluarga dan lingkungan sekitar lansia, menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan kegiatan. Keterlibatan komunitas lokal, baik dalam bentuk partisipasi langsung maupun dukungan moral, mencerminkan adanya kepedulian sosial yang tinggi terhadap kesejahteraan lansia. Temuan ini selaras dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (dalam Marwiyah, 2022), yang menekankan bahwa dukungan sosial masyarakat merupakan elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Namun demikian, dukungan dari lembaga eksternal, seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, maupun sektor swasta, masih terbilang minim. Kerja sama lintas sektor belum terbangun secara sistematis, sehingga pelaksanaan program masih sangat bergantung pada kapasitas internal desa. Minimnya kemitraan eksternal ini berpotensi membatasi cakupan serta efektivitas program dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk membangun sinergi yang lebih luas melalui penguatan koordinasi

antarinstansi dan kemitraan lintas sektor. Dengan dukungan yang lebih terstruktur, program lansia tidak hanya akan lebih berdaya guna, tetapi juga memiliki ketahanan dan keberlanjutan yang lebih kuat dalam menjawab kebutuhan sosial lansia secara menyeluruh.

#### 6. Disposisi Implementor

Disposisi atau sikap pelaksana terhadap program lansia di Desa Tanjungmulya menunjukkan kecenderungan yang sangat positif. Informan menyampaikan bahwa para pelaksana, terutama kader program lansia menjalankan tugas mereka dengan dedikasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Mereka tidak hanya memahami peran masing-masing, tetapi juga menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap lansia sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen dan kesungguhan para pelaksana menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung keberhasilan program. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Pramono, 2020) yang menyatakan bahwa disposisi implementor memainkan peran kunci dalam memastikan kebijakan dapat berjalan secara efektif di lapangan.

Namun demikian, bergantung sepenuhnya pada motivasi individu kembali menjadi catatan penting. Beberapa informan mengungkapkan adanya potensi penurunan semangat kerja apabila tidak disertai dengan

dukungan lingkungan kerja yang memadai, seperti sistem penghargaan yang layak, pendampingan berkelanjutan, dan penguatan peran institusional. Tanpa adanya dukungan kelembagaan yang konsisten, pelaksanaan program berisiko tidak stabil karena terlalu bertumpu pada dorongan pribadi pelaksana.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah desa dan mitra terkait untuk menciptakan iklim kerja yang mendukung, serta merancang sistem insentif yang proporsional. Hal ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program secara jangka panjang dan mencegah kelelahan emosional atau penurunan motivasi di kalangan pelaksana.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program lansia di Desa Tanjungmulya secara umum telah berjalan cukup baik, khususnya dalam hal partisipasi dan komitmen para pelaksana. Program dinilai telah cukup tepat sasaran serta memperoleh dukungan dari masyarakat. Selain itu, para pelaksana menunjukkan sikap positif dan tingkat tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka.

Namun, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Koordinasi antarinstansi, khususnya dengan pihak eksternal belum berjalan optimal. Selain itu, pelaksanaan program masih sangat bergantung pada motivasi pribadi pelaksana, yang

berisiko menurun jika tidak disertai dukungan institusional yang memadai, seperti pelatihan, insentif, dan supervisi.

Oleh karena itu, agar program lansia dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan penguatan dukungan kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan lansia secara lebih aktif dalam proses perencanaan sampai dengan evaluasi program.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik*. Probolinggo: Universitas Panca Marga.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- De Tavernier, W., & Aartsen, M. (2019). *Old-Age Exclusion: Active Ageing, Ageism and Agency*. *Social Inclusion*, 7(3), 1–3. <https://doi.org/10.17645/si.v7i3.2372>
- Hartawan, R. C., Kosasih, F., & Rochmani. (2023). *Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System*

*Policies Model. International Journal Of Humanities Education And Social Sciences, 2(4), 1348-1358.*  
<https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i4.373>

Karohmah, A, N & Ilyas. (2017). Peran Posyandu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Pasirmuncang. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah, 2(2), 144.*